GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 316 /B.03/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/80/B.03/HK/2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala Daerah, yang telah di tetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/80/B.03/HK/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2021;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas perubahan tersebut dikarenakan adanya usulan Rancangan Peraturan Gubernur yang belum masuk dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/80/B.03/HK/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2021, maka perlu dilakuan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/80/B.03/HK/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/80/B.03/HK/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/80/B.03/HK/2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/80/B.03/HK/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/80/B.03/HK/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 6 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.03/HK/2021
TANGGAL : 2021

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2021

NO	INSTANSI PENGUSUL	JUDUL PERGUB	PERTIMBANGAN DAN DASAR PENYUSUNAN
1	Badan Kepegawaian Daerah	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19	Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Renstra Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
		2. Prioritas Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
		3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
		4. Master Plan *Smart Village* Provinsi Lampung	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
		5. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
		6. Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (Perseroan Daerah) Dalam Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni *Harbour City*	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024

3	Badan Pendapatan Daerah	Pemberian Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Terhadap Pokok, Denda dan Bunga Atas Hutang Pajak Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021	Menampung kebijakan daerah dalam mengatur dampak pandemi COVID-19
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
		2. Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional
		3. Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber Dari APBD	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		4. Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		5. Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		6. Tata Cara Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		7. Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		9. Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Tindaklanjuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		10. Pedoman Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
5	Inspektorat	1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Arahan dari KPK RI

		2. Pengaduan Masyarakat	Tindak lanjut Peraturan Menteri PAN Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
6	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Sampah Jakstrada Provinsi Lampung memuat: a. Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;dan b. Strategi, Program, dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Jakstrada Provinsi tersebut dilaksanakan dalam periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025
		2. Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan Pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
7	Dinas Perkebunan	Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Produksi Pekebun di Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebunan.
8	Dinas Kesehatan	1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung
		3. Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

		4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD (PPK BLUD) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		5. Pedoman Tata Kelola (*Hospital By Laws*) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		2. Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Kawasan Perdesaan dan Kawasan Lainnya	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
11	Rumah Sakit Jiwa Daerah	1. Penetapan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		2. Peraturan Gubernur Lampung Tentang Penggunaan SiLPA Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung T.A. 2020	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Pasal 96 Tahun 2018
		3. Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		2. Pedoman Pengelola Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		3. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		4. Peningkatan Budaya Literasi	Tindaklajut dari Amanat Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019
13	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerjasama Daerah Provinsi Lampung
		2. Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur Lampung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung	Tindaklanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

		4. Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pelayanan Publik di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	Tindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
14	Biro Organisasi	1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
		2. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025
		3. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi terkait pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
		4. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
		5. Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendidikan SMKN Pertanian Pembangunan Lampung pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis Oprasional dan/atau Teknis Penunjang Dinas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Daerah Berjalan Lancar, Tertib, Berdaya Guna dan Berhasil Guna
		6. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ada Penambahan dan Pengurangan Tugas Pokok dan Fungsi pada Bagian, Bidang, dan Seksi
		7. UPT PKTK (Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan)	Alur Pelayanan Terpadu Anak dan Perempuan Korban Kekerasan
15	Sekretariat DPRD	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung	Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung

16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	1. Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan di Provinsi Lampung	Tindaklanjut pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
		2. Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK)	Tindaklanjut pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Peta Jalan Pengembangan SMK Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Provinsi Lampung dengan Menyusun Peta Jalan Pengembangan SMK Provinsi Lampung Tahun 2020-2021
		2. Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020	Bantuan Daerah Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA dan SMK
		3. Pedoman Penyelenggaraan SMA Negeri Olahraga Lampung	Tata Kelola SMA Negeri Olahraga Lampung
		4. Penyelenggaraan PAUD Holkistik Integratif	Pembentukan Gugus Tugas PAUD Holkistik Integratif
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pembangunan Kotabaru Provinsi Lampung	Memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permen PU Nomor 6/PRT//2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
20	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek	1. Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Pihak Ketiga	Peraturan yang mendasari Pergub ini sudah ada yang baru/ sudah diperbaharui
		2. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Peraturan yang mendasari Pergub ini sudah ada yang baru/ sudah diperbaharui
21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penyaluran untuk memberikan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
22	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	1. Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi	Tindaklanjut Amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

		2. Pembinaan Jasa Konstruksi	Tindaklanjut Amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Provinsi Layak Anak	Implementasi turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung
		2. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Lampung	Implementasi turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga
		3. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	Implementasi turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga
		4. Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Implementasi turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung
		5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak	Implementasi turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung
24	Biro Administrasi Pembagunan	1. Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Penyesuiaan Persyaratan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
		2. Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung	Penyesuaian RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
25	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021tentang Riset dan Inovasi Daerah	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI